



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2913-2920

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Penerapan Prinsip Good Governance dalam Perencanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Lampung Utara Kotabumi Selatan

Justitia Adysti¹, Feni Rosalia²

^{1,2}Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

advstijustitia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam perencanaan Program Makan Bergizi (MBG) di Kabupaten Lampung Utara, dengan penekanan pada implementasinya di Kecamatan Kotabumi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan para pengelola program, serta telaah berbagai dokumen resmi yang berfungsi sebagai sumber data primer maupun sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Program MBG telah mengadopsi beberapa prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Prinsip *appropriateness* tampak dari penyusunan menu yang diselenggarakan dengan kebutuhan gizi anak sekolah berdasarkan kategori usia serta standar kecukupan nutrisi nasional. Prinsip *accessibility* tergambar melalui upaya pemerataan layanan hingga ke wilayah yang sulit dijangkau, sehingga memastikan bahwa seluruh sasaran program memperoleh manfaat secara setara. Selanjutnya, prinsip *continuity* diwujudkan melalui keberlanjutan pasokan bahan pangan, perencanaan logistik yang teratur, serta distribusi makanan yang konsisten setiap hari sekolah. Di sisi lain, prinsip *technical* tercermin dari pelibatan tenaga profesional, antara lain lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, juru masak terlatih, serta tenaga administrasi yang bekerja sesuai standar operasional prosedur. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan Program MBG telah selaras dengan prinsip pelayanan publik yang efektif dan berorientasi pada kualitas. Meskipun demikian, peningkatan koordinasi antar-aktor, penguatan mekanisme evaluasi, serta pemantauan berkelanjutan masih diperlukan guna menjaga mutu layanan dan memastikan keberlanjutan program di masa mendatang.

Kata kunci: Good Governance, Pelayanan Publik, Perencanaan Program, Program Makan Bergizi

1. Latar Belakang

Saat ini, masyarakat Indonesia menaruh harapan kepada pemerintah untuk mewujudkan *good governance*, yakni penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta penuh tanggung jawab (Maryam, 2016). *Good governance* merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memperbaiki pola penyelenggaraan layanan publik dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi, mengingat bahwa visi dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah terwujudnya *Good Governance*. Pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan sebuah konsep kolektif yang mencakup seluruh tindakan dan perilaku yang berfungsi untuk mengarahkan, mengontrol, serta memengaruhi pengelolaan urusan publik. Tujuannya adalah untuk mewujudkan nilai-nilai pemerintahan yang baik dalam praktik kehidupan sehari-hari (Nurhidayat, 2023). Maka perlu disadari bahwa hal tersebut layak dan sangat penting untuk dikembangkan dalam tubuh pelayanan publik di Indonesia (Palangda & Dame, 2020). Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk inovasi pelayanan publik di bidang sosial yang tengah digencarkan oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak usia sekolah, mengurangi angka stunting, serta memperkuat ketahanan sumber daya manusia sejak usia dini.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada Januari 2025 melalui Perpres No. 83 Tahun 2024 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dengan tujuan utama memberikan akses makanan bergizi kepada anak-anak, khususnya dari keluarga berpendapatan rendah, sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Syafiqoh & Setyawati, 2025). Program makan bergizi gratis merupakan kebijakan dan langkah pemerintah yang dirancang untuk

Penerapan Prinsip Good Governance dalam Perencanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Lampung Utara Kotabumi Selatan

menyediakan makanan sehat dan bernutrisi tanpa biaya kepada kelompok masyarakat tertentu, terutama peserta didik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas (Rahmah et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, persoalan gizi buruk serta ketidakmerataan akses pendidikan masih menjadi tantangan struktural yang signifikan. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi perkembangan fisik anak, tetapi juga berdampak pada kemampuan kognitif dan emosional mereka, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap proses belajar dan tingkat partisipasi dalam Pendidikan (Agustini, 2025). Program ini lahir dari keprihatinan terhadap tingginya angka stunting, gizi buruk, serta ketimpangan akses terhadap makanan sehat di berbagai daerah. (Rahayu, 2025).

Keberhasilan implementasi program MBG sangat bergantung pada kualitas perencanaannya. Perencanaan yang baik tidak hanya berorientasi pada target fisik dan administratif, tetapi juga harus mencerminkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar agar kebijakan publik tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Di Kabupaten Lampung Utara, program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan anak. Program MBG bertujuan mengatasi ketimpangan akses terhadap makanan bergizi, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu (Qomarrullah et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam mekanisme pengawasan, termasuk terjadinya beberapa kasus keracunan pada anak sekolah yang menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek pengendalian mutu dan pelaksanaan program. Kejadian tersebut menimbulkan kekhawatiran publik dan menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan mutu, koordinasi antar-instansi, serta mekanisme kontrol kebijakan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dalam proses perencanaan program tersebut.

Tabel 1. Data Keracunan Program MBG di UPTD RSD HM Ryacudu Kotabumi, Lampung Utara bulan September 2025

Jenis Kelamin	Jumlah	Diagnosa
Laki-Laki	2	Keracunan
Perempuan	31	Keracunan

Dalam beberapa kasus, kejadian keracunan tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian pihak pelaksana program, seperti penyediaan makanan yang basi atau tidak layak konsumsi. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah perbedaan kondisi fisik dan daya tahan tubuh (imunitas) peserta didik, yang menyebabkan sebagian anak tidak mampu menerima jenis atau porsi makanan yang disajikan dengan baik. Perbedaan kondisi ini menjadikan kasus keracunan sebagai fenomena yang kompleks dan tidak dapat serta-merta disimplifikasi sebagai kegagalan teknis semata. Situasi tersebut menciptakan polemik dan dilema kebijakan bagi pemerintah daerah, di mana di satu sisi program MBG bertujuan meningkatkan asupan gizi dan derajat kesehatan anak sekolah, namun di sisi lain menghadapi tantangan dalam menjaga standar keamanan pangan serta kesesuaian menu bagi setiap individu.

Berkenan dengan hal tersebut, pelayanan publik yang profesional perlu di wujudkan dalam *good governance*. Hal ini penting mengingat dalam sistem pemberian layanan kepada masyarakat akhir-akhir ini menunjukkan banyak permasalahan (Lestari et al., 2022). Kepuasan masyarakat merupakan faktor utama dalam tercapainya target pelayanan publik yang baik (Ayuningtyas, 2020). Pelayanan publik merupakan suatu kewajiban bagi penyelenggara pelayanan untuk memenuhinya. Menerima pelayanan yang berkualitas merupakan harapan utama masyarakat (Jamal et al., 2020).

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan menggambarkan sembu fenomena yang terjadi dilapangan untuk dijadikan obyek riset. Metode penelitian deskriptif ini diharapkan dapat menggambarkan fenomena yang terjadi melalui pengamatan, wawancara untuk mendapatkan gambaran mengenai apa yang sesungguhnya terjadi.

Metode pada penelitian ini bersifat eksploratif, intrepetatif, dan konstruktif yang dapat digunakan untuk menggali obyek secara lebih mendalam, sehingga dapat ditemukan potensi masalah dan hipotesis. Dalam penelitian ini model tinjauan pustaka digunakan untuk memastikan bahwa pengumpulan data dan informasi terpercaya dengan menggunakan tinjauan penelitian sebelumnya, data publik dan informasi yang terkait.

Penggunaan metode penelitian kualitatif dikarenakan peneliti dapat lebih mendapat penjelasan yang mendalam, rinci dan dapat dipahami secara umum, Kirk dan Miller dalam Moleong juga menyatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan secara fundamental dalam ilmu pengetahuan sosial karena sumber ilmu didapat dari

pengamatan manusia, hasil dialog dan perluasan sebuah tema yang diteliti. Dengan demikian tujuan penelitian untuk memahami sebuah fenomena yang terjadi secara alami, dan mengaitkan dengan kondisi mutakhir ilmu pengetahuan.

3. Hasil dan Diskusi

Pada masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024–2029, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung program makan siang gratis sebagai salah satu prioritas kebijakan yang ditawarkan kepada publik. Program ini diarahkan untuk menurunkan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas gizi anak di Indonesia. Pada berbagai kesempatan kampanye, keduanya menegaskan komitmen bahwa program tersebut bukan sekadar janji politik, tetapi akan direalisasikan apabila terpilih memimpin pemerintahan. Setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming resmi memenangkan pemilihan dan menjabat sebagai Presiden serta Wakil Presiden, program makan siang gratis mulai diimplementasikan pada 6 Januari 2025. Pelaksanaan program ini menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap pemenuhan gizi yang layak bagi seluruh warga, terutama kelompok masyarakat yang kurang mampu, sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang lebih sehat dan berkualitas (Kiftiyah et al., 2025).

Program MBG yang digagas oleh BGN memiliki landasan misi yang jelas untuk “Menuju Indonesia Emas” dengan program komprehensif yang di rancang untuk memastikan setiap individu mendapatkan asupan gizi optimal, mendukung tercapainya Indonesia Emas melalui generasi yang sehat dan berkualitas. Selaras dengan visi pemerintah “Indonesia Emas 2045” untuk menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif, program MBG dirancang sebagai salah satu instrumen strategis.

Berdasarkan dokumen BGN (Badan Gizi Nasional) tujuan strategis dari program ini antara lain, memastikan status gizi optimal bagi setiap individu (termasuk peserta didik, ibu hamil, menyusui, balita) sebagai fondasi sumber daya manusia (SDM) unggul, menurunkan angka morbiditas dan mortalitas khususnya pada kelompok rentan, serta meningkatkan partisipasi sekolah dan masyarakat dalam pemenuhan gizi.

Mekanisme pelaksanaan program MBG dijabarkan melalui pembentukan unit-pelaksana di lapangan yaitu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan melaksanakan pemberian makan bergizi secara rutin di sekolah/sekolah mitra. Mekanisme pemberian program MBG di sekolah dirancang berlangsung setiap hari sekolah (Senin hingga Jumat atau Sabtu), kecuali hari libur, agar asupan gizi anak-sekolah dapat terpenuhi secara konsisten. Dalam kondisi khusus seperti bulan Ramadan, program ini menyesuaikan dengan distribusi paket makanan yang bisa dibawa pulang dan dinikmati saat berbuka, sebagai bentuk adaptasi terhadap konteks sosial dan keagamaan.

Pelayanan publik merupakan salah satu wujud konkret dari penerapan prinsip *good governance*, karena melalui pelayanan publik yang baik dan memuaskan, pemerintah dapat memperlihatkan sejauh mana fungsi pemerintahan dijalankan secara efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Amba et al., 2023). Pelayanan publik bukan hanya aktivitas birokrasi yang bersifat teknis, tetapi merupakan instrumen strategis yang mencerminkan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga sehingga produktivitas dan mutu pelayanan berpengaruh langsung terhadap kepercayaan, penerimaan, serta dukungan masyarakat terhadap keberlangsungan kebijakan pemerintah. Untuk mewujudkan kualitas pelayanan tersebut diperlukan suatu sistem pendukung yang baik, sarana dan prasarana yang layak, serta sikap profesional dari pegawai yang melakukan pelayanan (Rahmawati & Subadi, 2020).

Sejalan dengan berkembangnya paradigma *New Public Management (NPM)* yang menekankan efisiensi, efektivitas, hasil (*outcome*), dan orientasi pada kepuasan pengguna layanan, maka penerapan prinsip *good governance* menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk menyediakan layanan yang dapat diakses, namun juga mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kendala yang muncul sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Dalam kerangka tersebut, kualitas pelayanan publik dapat dilihat melalui penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima, yang mencakup *appropriateness*, *accessibility*, *continuity*, dan *technical*. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menilai sejauh mana pelayanan publik termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat, mampu dijangkau secara merata, berkelanjutan, dan dikelola oleh sumber daya yang memiliki kompetensi teknis yang memadai.

Appropriateness: Setiap jenis produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah harus relevan dan signifikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat; Prinsip *appropriateness* dalam konsep *good governance* menekankan pentingnya kesesuaian kebijakan publik dengan kebutuhan nyata masyarakat yang menjadi sasaran program. Dalam konteks pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan

Kotabumi Selatan, prinsip ini tercermin melalui upaya pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap produk makanan yang disediakan relevan dengan kebutuhan gizi anak sekolah sesuai dengan usia dan tingkat pendidikannya. Program MBG yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Dinas Pendidikan ini menasar siswa sekolah negeri, dengan pola pemberian menu makan bergizi satu kali dalam sehari di lingkungan sekolah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kerja sama dengan penyedia makanan lokal, yang memungkinkan adanya keterlibatan pelaku usaha kecil di daerah serta pemanfaatan bahan pangan lokal yang mudah dijangkau masyarakat.

Secara umum, produk makanan yang disediakan dalam program MBG sudah menunjukkan kesesuaian dengan standar kebutuhan gizi anak sekolah. Menu yang diberikan terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah yang mengandung unsur karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral dalam proporsi seimbang. Berdasarkan hasil observasi, porsi makanan yang disajikan rata-rata mengandung sekitar 600 hingga 700 kilokalori, sehingga mampu memenuhi sekitar sepertiga kebutuhan energi harian anak sekolah. Kandungan protein dalam menu juga cukup baik, dengan sumber utama seperti telur, ikan, ayam, atau tempe, yang masing-masing memiliki nilai gizi tinggi dan mudah dicerna oleh anak-anak. Selain itu, variasi karbohidrat yang berasal dari nasi, umbi-umbian, atau jagung turut memberikan kontribusi energi yang dibutuhkan anak untuk beraktivitas dan belajar. Komposisi makanan tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap keseimbangan gizi dan upaya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan energi berdasarkan kelompok usia.

Penerapan prinsip *appropriateness* juga terlihat dari pemanfaatan bahan pangan lokal dan keterlibatan masyarakat sekitar dalam penyediaan makanan. Banyak penyedia MBG di Kecamatan Kotabumi Selatan memanfaatkan bahan pangan yang mudah didapat di wilayah setempat, seperti sayuran hijau, ikan air tawar, tahu, dan tempe. Hal ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan lokal, tetapi juga memperkuat hubungan sosial-ekonomi antara sekolah, penyedia jasa, dan masyarakat. Pemanfaatan bahan lokal juga memastikan makanan yang disajikan lebih segar, sehat, dan sesuai dengan cita rasa anak-anak di daerah tersebut, sehingga tingkat penerimaan menu oleh siswa cukup tinggi. Dari sisi pelaksanaan, penyediaan makanan dilakukan dengan memperhatikan aspek kebersihan dan higienitas, baik dalam pengolahan maupun penyajian, yang diawasi langsung oleh pihak sekolah dan dinas terkait.

Secara substantif, kesesuaian program MBG dengan prinsip *appropriateness* juga tampak dalam perencanaan menu yang mempertimbangkan usia dan tingkat pendidikan peserta didik. Meskipun secara umum menu yang disajikan serupa antarjenjang pendidikan, porsi dan komposisi gizinya telah diupayakan agar tetap proporsional dengan kebutuhan energi anak sekolah dasar dan menengah. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya menyesuaikan program dengan karakteristik sasaran. Program MBG di Kotabumi Selatan juga berkontribusi dalam membentuk kebiasaan makan sehat di kalangan siswa serta menumbuhkan semangat belajar melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai. Banyak pihak sekolah melaporkan bahwa siswa menjadi lebih bersemangat mengikuti kegiatan belajar setelah penerapan program ini, yang mengindikasikan hubungan positif antara asupan gizi dengan produktivitas belajar.

Dengan demikian, penerapan prinsip *appropriateness* dalam pelaksanaan Program MBG di Kecamatan Kotabumi Selatan dapat dikatakan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah telah berupaya menyesuaikan produk makanan dengan kebutuhan gizi anak sekolah, melibatkan unsur masyarakat lokal, serta menjaga kualitas dan keseimbangan gizi dalam setiap penyajian. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk menghadirkan program yang tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan peserta didik, tetapi juga berdampak sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar. Program ini menjadi contoh nyata bagaimana penerapan prinsip *appropriateness* dapat diintegrasikan secara efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat daerah.

Accessibility: Setiap jenis produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dapat diakses sedekat dan sebanyak mungkin oleh masyarakat; Prinsip *accessibility* dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menekankan pentingnya keterjangkauan masyarakat terhadap manfaat kebijakan publik, baik dari segi produk, layanan, maupun proses pelaksanaannya. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kotabumi Selatan, penerapan prinsip ini tercermin melalui kemudahan masyarakat dan peserta didik dalam mengakses program. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Dinas Pendidikan telah berupaya memastikan bahwa program MBG dapat menjangkau seluruh satuan pendidikan di wilayah kecamatan, termasuk sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah pinggiran dan sulit dijangkau.

Secara umum, implementasi program MBG di Kotabumi Selatan menunjukkan tingkat aksesibilitas yang baik. Setiap sekolah penerima program memperoleh jadwal dan mekanisme distribusi yang jelas, sehingga seluruh siswa

di sekolah sasaran dapat menikmati manfaat program tanpa terkendala jarak maupun ketersediaan sarana. Pihak sekolah bersama penyedia makanan lokal juga memastikan bahwa proses penyediaan dan penyaluran makanan berjalan tepat waktu serta sesuai dengan kebutuhan jumlah siswa. Kehadiran program MBG ini dirasakan secara merata, bahkan di sekolah-sekolah yang berada di kawasan dengan infrastruktur terbatas, berkat dukungan koordinasi antara pemerintah daerah, pihak kecamatan, dan penyedia logistik yang aktif menjangkau wilayah terpencil. Upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di bidang gizi dan pendidikan.

Selain dari sisi jangkauan wilayah, prinsip *accessibility* juga terlihat dari keterbukaan informasi dan kemudahan masyarakat dalam memahami tujuan serta mekanisme pelaksanaan program. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan pihak sekolah membuat orang tua siswa memahami pentingnya asupan gizi seimbang bagi perkembangan anak. Melalui komunikasi langsung, dan kegiatan bersama komite sekolah, masyarakat dapat mengetahui jadwal pelaksanaan, menu makanan yang disajikan, hingga sumber penyedia bahan pangan. Transparansi ini mendorong partisipasi masyarakat untuk turut mendukung pelaksanaan program, baik melalui penyediaan bahan pangan lokal maupun pengawasan kualitas makanan. Dengan demikian, program MBG tidak hanya dapat diakses oleh siswa sebagai penerima manfaat utama, tetapi juga membuka ruang keterlibatan bagi masyarakat sekitar sebagai bagian dari proses pelaksanaan program.

Keberhasilan penerapan prinsip *accessibility* di Kecamatan Kotabumi Selatan juga didukung oleh pola pelaksanaan yang adaptif terhadap kondisi geografis daerah. Beberapa sekolah yang berada di wilayah yang agak jauh dari pusat kecamatan tetap dapat mengikuti program secara penuh berkat penjadwalan fleksibel dan dukungan transportasi dari pihak penyedia makanan. Pemerintah daerah juga memfasilitasi koordinasi antarsekolah agar penyedia katering dapat menjangkau lebih banyak lokasi dengan efisien. Pola distribusi seperti ini menjadi bukti bahwa akses terhadap program MBG tidak bersifat eksklusif, melainkan inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip *accessibility* dalam Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Kotabumi Selatan dapat dikatakan berjalan sangat baik. Program ini telah mampu menjangkau siswa di berbagai wilayah, termasuk di daerah yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan serupa, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi dan semangat belajar anak-anak sekolah. Pemerintah daerah berhasil menghadirkan program yang mudah diakses, transparan dalam pelaksanaan, dan membuka partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *accessibility* telah terimplementasi secara efektif dan berkontribusi terhadap tercapainya tujuan pemerataan pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan anak di Kabupaten Lampung Utara.

Continuity: Setiap jenis produk, proses dan mutu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus secara terusmenerus tersedia bagi masyarakat pengguna layanan; Prinsip *continuity* dalam *good governance* menekankan pentingnya keberlanjutan program publik agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara konsisten oleh masyarakat. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kotabumi Selatan, penerapan prinsip ini tercermin dari tersedianya produk, proses, dan menu program yang terus berjalan secara rutin tanpa mengalami gangguan berarti sejak peluncurannya. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Dinas Pendidikan secara aktif memastikan agar kegiatan penyediaan dan penyaluran makanan bergizi kepada peserta didik dapat berlangsung setiap hari sekolah, sehingga anak-anak penerima manfaat dapat merasakan keberlanjutan layanan gizi yang stabil dan terukur. Pelaksanaan program MBG di Kecamatan Kotabumi Selatan menunjukkan bahwa kontinuitas penyediaan produk makanan telah terjaga dengan baik. Setiap sekolah penerima program menerima pasokan menu sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dengan variasi makanan yang tetap memperhatikan keseimbangan gizi dan selera anak-anak. Penyedia makanan bekerja secara terjadwal dan berkoordinasi langsung dengan pihak sekolah untuk memastikan bahwa proses distribusi makanan tidak terputus. Dengan pola kerja ini, siswa memperoleh jaminan bahwa setiap hari mereka akan mendapatkan makanan bergizi dalam jumlah dan waktu yang konsisten. Keberlanjutan penyediaan produk makanan ini tidak hanya memberikan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga membantu membentuk pola makan sehat dan disiplin di lingkungan sekolah.

Selain keberlanjutan produk, aspek proses pelaksanaan juga menunjukkan konsistensi yang baik. Dinas Pendidikan bersama sekolah dan penyedia makanan secara berkesinambungan melakukan koordinasi agar pelaksanaan program tetap berjalan lancar. Mekanisme pengadaan bahan pangan, pengolahan, hingga pendistribusian dilakukan dengan sistem yang terstruktur, sehingga potensi keterlambatan maupun kekurangan bahan dapat diminimalisir.

Dari sisi menu, prinsip *continuity* juga tampak dalam upaya menjaga keberagaman makanan tanpa mengurangi kesinambungan penyediaannya. Menu makanan bergizi disusun dalam siklus tertentu yang diperbarui secara berkala agar siswa tidak merasa jenuh dengan jenis makanan yang sama, sekaligus memastikan bahwa seluruh unsur gizi tetap terpenuhi. Penggunaan bahan pangan lokal turut membantu menjaga kontinuitas pelaksanaan program karena bahan-bahan tersebut mudah diperoleh sepanjang tahun dan tidak bergantung pada pasokan dari luar daerah. Dengan demikian, keberlanjutan penyediaan produk dan proses MBG tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha lokal yang menjadi bagian dari rantai pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip *continuity* dalam Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Kotabumi Selatan dapat dikatakan berjalan dengan baik dan konsisten. Keberlanjutan program ini terlihat dari terjaminnya ketersediaan makanan bergizi setiap hari, keteraturan proses pelaksanaan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan bahan dan jadwal distribusi. Program MBG telah menjadi kegiatan rutin yang dinantikan oleh siswa di berbagai sekolah dan turut membangun budaya makan sehat di lingkungan pendidikan. Keberhasilan menjaga kesinambungan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat dalam memastikan program publik tidak hanya hadir sesaat, tetapi memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.

Technical: Setiap jenis produk, proses dan mutu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus ditangani oleh petugas yang benar-benar memiliki kecakapan teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan dan kemandirian aturan, sistem, prosedur dan instrumen pelayanan yang baku; Penerapan prinsip *technical* dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kotabumi Selatan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan tata kelola program dengan memperhatikan aspek keahlian, ketepatan prosedur, serta mutu pelayanan publik. Prinsip ini tercermin dari adanya pembagian tugas yang jelas antar pelaksana, penggunaan prosedur yang baku, serta keterlibatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pelaksanaan program di tingkat sekolah dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Latar belakang pendidikan tersebut membekali kepala SPPG dengan kemampuan dalam aspek manajerial, pengorganisasian kegiatan sosial berbasis masyarakat, serta pemahaman mendalam tentang strategi pembangunan manusia yang berkelanjutan. Hal ini sangat relevan dengan tanggung jawab kepala SPPG dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program MBG di sekolah, mulai dari perencanaan menu, pengawasan distribusi makanan, hingga evaluasi pelaksanaan program di lapangan. Dengan bekal keilmuan tersebut, kepala SPPG mampu menjembatani kepentingan antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat penerima manfaat secara profesional dan terukur.

Di sisi lain, pelaksanaan teknis gizi ditangani oleh tenaga ahli gizi yang merupakan lulusan sarjana gizi dan telah memiliki kompetensi dalam perencanaan kebutuhan nutrisi anak sekolah berdasarkan usia dan tingkat aktivitas. Para ahli gizi bertanggung jawab dalam menyusun menu harian, menghitung kandungan protein, karbohidrat, lemak, serta kalori sesuai dengan *Angka Kecukupan Gizi (AKG)* yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan. Mereka juga berperan dalam memberikan bimbingan teknis kepada juru masak dan tenaga pelaksana di sekolah tentang cara pengolahan bahan makanan agar nilai gizinya tetap optimal dan aman untuk dikonsumsi.

Aspek administrasi dan tata kelola keuangan program ditangani oleh tim akuntansi yang terdiri dari lulusan sarjana akuntansi, yang berperan dalam mengelola anggaran secara transparan, mencatat penggunaan dana secara terperinci, serta membuat laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan pemerintah daerah. Dengan kehadiran tenaga akuntansi yang profesional, pelaksanaan MBG di Kecamatan Kotabumi Selatan menunjukkan tingkat akuntabilitas dan efisiensi yang tinggi, serta memastikan bahwa seluruh sumber daya yang digunakan sesuai dengan tujuan program.

Sementara itu, proses pengolahan makanan ditangani oleh juru masak profesional yang telah berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang kuliner. Para juru masak ini bekerja berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, serta berkoordinasi langsung dengan ahli gizi dan kepala SPPG. Mereka memastikan setiap tahapan mulai dari pemilihan bahan, proses pengolahan, hingga penyajian dilakukan dengan menjaga kebersihan, keamanan pangan, serta kesesuaian porsi. Keberadaan tenaga juru masak terampil menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa kualitas dan cita rasa makanan tetap terjaga tanpa mengurangi nilai gizinya.

Selain kompetensi sumber daya manusia, pelaksanaan prinsip *technical* juga didukung oleh sistem dan instrumen pelayanan yang baku. Pemerintah daerah telah menyediakan berbagai dokumen teknis seperti panduan menu bergizi, standar bahan makanan, pedoman kebersihan dan penyimpanan bahan pangan, serta format pelaporan dan evaluasi harian. Dokumen tersebut menjadi pedoman utama bagi pelaksana di lapangan, sehingga setiap kegiatan program dapat berjalan dengan konsisten, teratur, dan sesuai dengan standar mutu pelayanan publik.

Mekanisme pengawasan juga dilakukan secara rutin melalui kunjungan lapangan oleh tim ahli gizi dan pengawas daerah. Setiap hasil evaluasi menjadi dasar untuk melakukan penyempurnaan dalam aspek teknis, seperti penyesuaian menu, peningkatan variasi bahan makanan, maupun perbaikan proses pengolahan di sekolah. Dengan demikian, sistem pelaksanaan program MBG di Kecamatan Kotabumi Selatan membentuk rantai kerja yang solid dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan. Secara keseluruhan, penerapan prinsip *technical* dalam Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Kotabumi Selatan telah mencerminkan pelaksanaan *good governance* yang berbasis pada profesionalisme dan kejelasan prosedural. Dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten di bidangnya, menerapkan standar teknis yang baku, serta melaksanakan mekanisme evaluasi yang terstruktur, program ini berhasil menunjukkan tata kelola pelayanan publik yang efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan bagi kesejahteraan peserta didik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai program Makan Bergizi (MBG), dapat dipahami bahwa kualitas perencanaan pelayanan publik menjadi faktor utama yang menentukan efektivitas program. Penetapan sasaran yang tepat dan berbasis data memastikan bahwa layanan benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Mekanisme pelaksanaan program yang tersusun melalui SOP yang jelas turut menjamin keteraturan, mutu, dan keberlanjutan layanan. Selain itu, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, penyedia bahan makanan, serta unsur masyarakat menjadi penopang penting dalam menjaga kelancaran implementasi. Untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas layanan, sistem pengawasan yang responsif dan transparan juga memiliki peran strategis agar setiap proses dapat dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG di masa mendatang, pemerintah perlu memperkuat pemutakhiran data penerima manfaat dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor, sehingga penetapan sasaran program menjadi lebih akurat. Mekanisme pelaksanaan perlu diperkaya melalui standarisasi prosedur yang lebih rinci dari tahap pengadaan hingga distribusi makanan di seluruh wilayah pelaksana. Selain itu, koordinasi antar lembaga perlu terus dioptimalkan dengan memperjelas pembagian peran dan jalur komunikasi, sehingga potensi tumpang tindih dapat diminimalisir. Terakhir, pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara terstruktur dengan memanfaatkan teknologi pemantauan yang memungkinkan pelaporan cepat dan akurat, sehingga keberlanjutan dan kualitas program dapat terjaga secara konsisten.

Referensi

1. Amba, N., Saleky, S. R. J., & Sahertian, O. L. (2023). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH. *Jurnal Administrasi Terapan*, 2(1), 232–239.
2. Agustini, U. (2025). Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362–368. <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>
3. Amba, N., Saleky, S. R. J., & Sahertian, O. L. (2023). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH. *Jurnal Administrasi Terapan*, 2(1), 232–239.
4. Ayuningtyas, D. W. (2020). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK KEIMIGRASIAN. *JAID*, 2(1), 1–13.
5. Jamal, Y., Mustanir, A., & Latif, A. (2020). Penerapan prinsip good governance terhadap aparat desa dalam pelayanan publik di desa ciro-ciro kecamatan watang pulu kabupaten sidenreng rappang. *PRAJA*, 8(3), 207–212.
6. Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Makan Bergizi Gratis (MBG) Program in the Perspective of Social Justice and Socio – Political Dynamics. *PANCASILA : Jurnal Keindonesiaan*, 05(1).
7. Lestari, R. A., Santoso, S. A., Wijaya, U., Surabaya, K., Sebelas, U., & Surakarta, M. (2022). Pelayanan publik dalam Good Governance. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispol)*, 2(1), 43–55.
8. Maryam, N. S. (2016). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 1–18.
9. Nurhidayat, I. (2023). *PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-govHalaman40>
10. Palangda, L., & Dame, J. M. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Public Policy*, 1(2), 274–287.

11. Qomarrullah, R., Suratni, S. L. W., & Sawir, M. (2025). DAMPAK JANGKA PANJANG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS TERHADAP KESEHATAN DAN KEBERLANJUTAN PENDIDIKAN THE LONG-TERM IMPACT OF THE FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM ON HEALTH AND EDUCATIONAL SUSTAINABILITY. *IJI Publication*, 5(2), 130–137.
12. Rahayu, L. F. (2025). Dinamika Dukungan Politik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), 815–831.
13. Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Salsabilla, E. P. (2025). ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI SEKOLAH DASAR INDONESIA TAHUN 2025. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2855.
14. Rahmawati, & Subadi, W. (2020). Kualitas Pelayanan Masyarakat Dilihat Dari Aspek Tangible (Berwujud) Dalam Rangka Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Desa Muara Langon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Rahmawati ; Wahyu Subadi)*. *JAPB*, 3(2), 1042–1056.
15. Syafiqoh, I., & Setyawati, A. (2025). Program MBG (Makan Bergizi Gratis) Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini di Lamongan. *Jurnal Almurtaja : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1020(1), 1–6.